

Pendampingan Administrasi Desa Gelangsar Melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

GELANGSAR VILLAGE ADMINISTRATION ASSISTANCE THROUGH IMPROVING THE CAPACITY OF VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

¹⁾ Baiq Reinelda Tri Yunarni, ²⁾ Dedy Iswanto, ³⁾ Ramayanto

^{1,2,3)} Universitas Muhammadiyah Mataram

¹⁾ reinalda.yunarni@gmail.com ²⁾ Dedy.Iswanto@ummat.ac.id ³⁾ Ramayanto@ummat.ac.id

ABSTRAK

Bidang administrasi pemerintah desa dari hasil observasi yang dilakukan terdapat beberapa kekurangan dalam bentuk fisik maupun non fisik, seperti belum adanya ruang tunggu dalam pemberian pelayanan administrasi di tingkat Desa, Papan informasi tentang alur dan proses pengurusan berbagai macam surat dan administrasi di tingkat Desa, Sistem kearsipan dan administrasi dengan yang belum tertata dengan baik hingga pada tingkat Dusun, Pendataan Jumlah Penduduk yang masih belum akurat, Profil Desa yang masih belum Lengkap, peningkatan kualitas pelayanan dan berbagai persoalan lainnya yang memerlukan perbaikan dalam mendukung sistem Administrasi Desa yang baik sehingga melahirkan Pemerintahan yang Progresif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di desa.

Perbaikan dan peningkatan kualitas pemerintah Desa perlu di dukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjawab berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Terutama dalam mengembangkan berbagai Potensi dan sumber daya di tingkat Desa sehingga dapat menjadi Pilar pengembangan ekonomi yang dapat menggerakkan Sektor sektor Produktif yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup Masyarakat.

Kata Kunci : Pendampingan Administrasi, Peningkatan Kapasitas.

ABSTRACT

In the field of village government administration, from the results of observations made there are several deficiencies in physical and non-physical forms, such as the absence of a waiting room in the provision of administrative services at the village level, information boards about the flow and process of handling various kinds of letters and administration at the village level, archiving systems and administration which has not been properly organized down to the hamlet level, inaccurate Population Data Collection, incomplete Village Profiles, improvement in service quality and various other issues that require improvement in supporting a good Village Administration system so as to give birth to a Progressive Government. in providing excellent service to the community in order to solve various problems that occur in the village.

Improvement and enhancement of the quality of the village government needs to be supported by the development of the quality of human resources who are capable of answering various problems that occur in the community. Especially in developing various potentials and resources at the village level so that they can become pillars of economic development that can drive the productive sector sector which is beneficial for the survival of the community.

Keywords: Administrative Assistance, Capacity Building.

Submitted : 28 Maret 2021

Revision : 10 April 2021

Accepted : 29 Mei 2021

PENDAHULUAN

Bidang administrasi pemerintah desa dari hasil observasi yang dilakukan terdapat beberapa kekurangan dalam bentuk fisik maupun non fisik, seperti belum adanya ruang tunggu dalam pemberian pelayanan administrasi di tingkat Desa, Papan informasi tentang alur dan proses pengurusan berbagai macam surat dan administrasi di tingkat Desa, Sistem kearsipan dan administrasi dengan yang belum tertata dengan baik hingga pada tingkat Dusun, Pendataan Jumlah Penduduk yang masih belum akurat, Profil Desa yang masih belum Lengkap, peningkatan kualitas pelayanan dan berbagai persoalan lainnya yang memerlukan perbaikan dalam mendukung sistem Administrasi Desa yang baik sehingga melahirkan Pemerintahan yang Progresif dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di desa. Perbaikan dan peningkatan kualitas pemerintah Desa perlu di dukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai dalam menjawab berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Terutama dalam mengembangkan berbagai Potensi dan sumber daya di tingkat Desa sehingga dapat menjadi Pilar pengembangan ekonomi yang dapat menggerakkan Sektor sektor Produktif yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup Masyarakat. Kini kemampuan aparaturnya pemerintah desa menjadi suatu keharusan seiring dengan berkembangnya program pemerintah pusat yang menjadikan desa sebagai pusat pembangunan berbagai perubahan peraturan dan perundang-undangan serta adanya pengadaan dana desa turut menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk dapat memiliki pandangan yang berkemajuan dan kemampuan yang memadai sehingga dapat menjalankan sistem pemerintah dengan baik sekaligus menggerakkan roda pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Metode yang digunakan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu aparaturnya desa melayani masyarakat di Kantor Desa Gelangsar dengan melibatkan Mahasiswa

2. Mendata penduduk, mendata Sumber Daya Manusia (SDM), Mendata Sumber Daya Alam (SDA), dan merapikan administrasi pemerintah Desa Gelangsar
3. Pelatihan Penataan Administrasi Desa, BPD, PPK Dan Kepala Dusun guna menambah wawasan serta meningkatkan kinerja Staff Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lingkup Lembaga Kemasyarakatan Desa Pelaksanaan

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang modern diperkenalkan kepada masyarakat Desa sejak UU No. 5/1979 dengan nama yang seragam dan korporatis di seluruh Desa seperti: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Dasawisma, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Padahal jauh sebelumnya, setiap desa memiliki lembaga-lembaga lokal yang tumbuh dari masyarakat. Di era reformasi, pengaturan kelembagaan masyarakat tidak lagi bersifat seragam, meski tetap membuat standar seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan PKK.

Berbagai lembaga kemasyarakatan di desa berfungsi sebagai wadah organisasi kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk kepentingan ketahanan sosial (*social security*) masyarakat, dan menyokong daya tahan ekonomi warga (*economic survival*). Di luar Jawa, umumnya RT dan RW sudah dihilangkan, namun di Jawa, RT tetap menjadi lembaga kemasyarakatan yang menonjol, dengan tetap menjalankan fungsi kemasyarakatan dan juga fungsi administrasi pemerintahan. Rukun Tetangga (RT) juga menjadi benteng keamanan dan ketertiban maupun tradisi sistem keamanan lingkungan, untuk menghimpun berbagai bentuk dana dari masyarakat dalam rangka kepentingan simpanan dana sosial maupun untuk gotong-royong. Rumusan pengaturan sebagaimana dimaksud oleh UU Desa tertuang pada Bab XII: Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

2. Manajemen

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Defmisi Mary Parker Follet ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin

mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin - dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Unsur MSDM adalah manusia. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya.

SIMPULAN

Perbaikan dan peningkatan kualitas pemerintah Desa perlu didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam menjawab berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Terutama dalam mengembangkan berbagai potensi dan sumber daya di tingkat Desa sehingga dapat menjadi pilar pengembangan ekonomi yang dapat menggerakkan sektor-sektor produktif yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Finch, Lyod (2004), *”Success as a Customer Service Representative”*, Crisp Publication.

Hadiwardoyo, Sauki. (1999). "*Pola Umum Tata Kearsipan Instansi*", dalam Berita Kearsipan Nasional, No.39.

Mussry, Jacky, Sastrawinata (2012), "*Service with Character*", PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang No. 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.